Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi) Vol 5, No.1, Mei 2025, pp.250-258
p-ISSN : 2808-9022 (print)
e-ISSN : 2798-1789 (online)
http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB ■ page 250

PENDEKATAN MULTIDIMENSIONAL INSPEKTORAT DALAM REVIU KEUANGAN: MENGGABUNGKAN PERSPEKTIF RISIKO SISTEMATIK DAN KEPATUHAN STANDAR AKUNTANSI GLOBAL

Mohamad Djasuli [1], Yesy Selfiana[2]
[1]Universitas Trunojoyo Madura
Bangkalan, Madura, (031)-3011146, e-mail: djasuli@trunojoyo.ac.id
[2]Universitas Trunojoyo Madura
Bangkalan, Madura, (031)-3011146, e-mail: 220221100118@student.trunojoyo.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 5 May 2025
Received in revised form 20 May 2025
Accepted 20 May 2025
Available online 31 May 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the multidimensional approach applied by the Inspectorate in reviewing local government financial statements, emphasizing the integration between the systematic risk perspective and compliance with global accounting standards. Through a descriptive qualitative method with a case study approach in several local governments, this study found that the multidimensional approach is able to make a significant contribution in improving the quality of internal control, strengthening accountability, and promoting transparency in public financial management. The integration of risk mapping and evaluation of compliance with international standards such as IPSAS, allows the inspectorate to detect potential irregularities early and provide more strategic and evidence-based recommendations. The results also show that there are still obstacles in implementing this approach, including limited human resource competencies, lack of technical training, and limited review time. Nevertheless, this approach has proven to be adaptive to the dynamic complexity of financial management in the modern era. Thus, the multidimensional approach is a relevant strategy to support bureaucratic reform, improve the quality of financial report reviews, and strengthen good governance.

Keywords: *Multidimensional, Financial Review, Inspectorate, Systematic Risk, Global Accounting Standards*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan multidimensional yang diterapkan oleh Inspektorat dalam melakukan reviu laporan keuangan pemerintah daerah, dengan menekankan integrasi antara perspektif risiko sistematik dan kepatuhan terhadap standar akuntansi global. Melalui metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di beberapa pemerintah daerah, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan multidimensional mampu memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal, memperkuat akuntabilitas, dan mendorong transparansi pengelolaan keuangan publik. Integrasi antara pemetaan risiko dan evaluasi kepatuhan terhadap standar internasional seperti IPSAS, memungkinkan inspektorat mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini serta memberikan rekomendasi yang lebih strategis dan berbasis bukti. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam penerapan pendekatan ini, antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kurangnya pelatihan teknis, serta waktu reviu yang terbatas. Meskipun demikian, pendekatan ini terbukti adaptif terhadap dinamika kompleksitas pengelolaan keuangan di era

Received May 5, 2025; Revised May 20, 2025 Accepted May 20, 2025

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

modern. Dengan demikian, pendekatan multidimensional menjadi strategi yang relevan untuk mendukung reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas reviu laporan keuangan, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Kata Kunci: Multidimensional, Reviu keuangan, Inspektorat, risiko sistematik, standar akuntansi global.

1. PENDAHULUAN

Badan pengawas keuangan semakin banyak mengadopsi strategi multifaset untuk meningkatkan integritas dan stabilitas sistem keuangan (McGrath & Walker, 2022). Hal ini melibatkan pengintegrasian penilaian risiko yang sistematis dengan kepatuhan terhadap standar akuntansi global (Weber, 2010). Strategi ini sangat penting di era yang ditandai dengan instrumen keuangan yang rumit dan pasar global yang saling terhubung (Demartini & Trucco, 2017). Fungsi inspektorat telah berevolusi dari sekadar audit konvensional menjadi analisis risiko berwawasan ke depan dan pemantauan kepatuhan yang proaktif, yang mencerminkan peningkatan kesadaran akan kerentanan sistemik yang dapat memicu krisis keuangan yang meluas. Pendekatan yang komprehensif ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang risiko ekonomi tingkat makro dan praktik akuntansi tingkat mikro, untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan beroperasi dalam kerangka kerja yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan ketahanan. Transformasi ini mengakui keterbatasan mengandalkan data historis dan audit berkala saja, namun juga mengadvokasi pemantauan berkelanjutan dan protokol manajemen risiko yang adaptif (Arnaboldi & Vasciaveo, 2017).

Dalam lanskap regulasi dan pengawasan keuangan yang rumit, inspektorat memainkan peran penting dalam memastikan stabilitas, transparansi, dan integritas sistem keuangan. Badan-badan ini diberi tanggung jawab untuk melakukan tinjauan keuangan, yang berfungsi sebagai evaluasi kritis terhadap kesehatan keuangan organisasi, praktik manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap standar peraturan (Arnaboldi & Vasciaveo, 2017). Efektivitas tinjauan ini bergantung pada penerapan pendekatan multidimensi yang mempertimbangkan faktor risiko sistematis dan kepatuhan terhadap standar akuntansi global, untuk memastikan penilaian yang holistik dan kuat (Weber, 2010). Sifat keuangan modern yang mengglobal membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang Standar Pelaporan Keuangan Internasional dan dampaknya terhadap praktik akuntansi di berbagai konteks peraturan dan budaya (Abdul & Abdullah, 2022). Pemahaman ini sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap pelaporan keuangan global dan mencegah pelanggaran keuangan (Akande Popoola & Temitope, 2017).

Pendekatan multidimensi yang dianjurkan di sini memerlukan pergeseran paradigma, bergerak melampaui mentalitas daftar periksa belaka menuju pemahaman yang lebih bernuansa tentang hubungan yang rumit antara berbagai faktor organisasi dan potensi dampaknya terhadap integritas keuangan (M. Sun & Qu, 2020). Kemajuan teknologi dalam audit mengubah cara auditor mengumpulkan, menganalisis, dan memproses data, mengoptimalkan efisiensi operasional, dan memberikan peran yang lebih strategis kepada auditor (Leocádio et al., 2024; Y. Sun et al., 2024). Integrasi berbagai perspektif memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif dan berwawasan luas atas risiko keuangan dan kepatuhan, yang pada akhirnya mendorong akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan publik.

Sebagian besar penelitian terdahulu masih memfokuskan kajiannya pada audit berbasis risiko dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Hariadi & Slamet (2020), ditemukan bahwa perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik (BPS) melibatkan proses penilaian risiko yang diinisiasi oleh inspektorat. Dan dalam penelitian Lestari & Rahayu (2020) yang membahas mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dalam pengambilan keputusan internal dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas bagaimana inspektorat mengintegrasikan risiko sistemik dan kepatuhan terhadap standar akuntansi global secara simultan dalam proses riviu keuangan, yang sebenarnya merupakan tahapan penting sebelum audit dan pelaporan. Penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan merancang model audit multidimensi yang menggabungkan analisis risiko sistematik dan evaluasi kepatuhan standar global. Tujuan dari artikel ini akan mengeksplorasi komponen-komponen penting dari pendekatan tersebut, seperti apakah Inspektorat Kab. Bangkalan telah menerapkan pendekatan tersebut? dan Bagaimana Inspektorat Kab. Bangkalan menerapkan Risiko Sistematik dan kepatuhan terhadap standar akuntansi global dalam riviu keuangan?, hal ini dikarenakan pentingnya mengintegrasikan penilaian risiko sistematis dan kepatuhan terhadap standar akuntansi global untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi reviu keuangan yang dilakukan oleh inspektorat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pendekatan Multidimensional dalam Reviu Keuangan

Pendekatan Multidimensional dalam Reviu Keuangan (atau *financial review*) mengacu pada cara yang komprehensif dan menyeluruh dalam menganalisis laporan keuangan, tidak hanya dari sisi angka, tapi juga dari sisi manajemen risiko, efisiensi, efektivitas, dan tata kelola**.** Pendekatan ini sangat relevan diterapkan dalam

konteks reviu keuangan pemerintah, baik oleh Inspektorat, BPKP, atau auditor internal lainnya. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 255/PMK.09/2015 Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan (LK) Kementerian/Lembaga (K/L) oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan LK K/L telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan LK K/L yang berkualitas.

Proses sistematis untuk mengevaluasi laporan keuangan suatu entitas guna menentukan apakah laporan tersebut disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP atau IFRS). Menurut Suwanda et al. (2017) tujuan reviu adalah untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dalam penyajian LKPD serta memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD serta telah disajikan sesuai dengan SAP. Menurut Baharom (2024), pendekatan ini memungkinkan auditor untuk lebih komprehensif dalam menilai tidak hanya kesalahan material, tetapi juga potensi kegagalan sistemik yang dapat merusak integritas keuangan entitas.

2.2. Perspektif Risiko Sistematik dalam Reviu

Penilaian risiko sistematis telah menjadi komponen yang sangat diperlukan dalam tinjauan keuangan modern, yang memungkinkan regulator untuk mengevaluasi dampak potensial dari faktor makroekonomi dan keterkaitan terhadap stabilitas lembaga keuangan (Aikman et al., 2018). Regulator semakin mengembangkan strategi berbasis risiko untuk mengelola sumber daya (Black & Baldwin, 2010). Oleh karena itu, inspektorat harus mengintegrasikan penilaian risiko sistematis ke dalam proses tinjauan keuangan mereka untuk memberikan evaluasi yang komprehensif atas posisi keuangan organisasi, terutama dalam kaitannya dengan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kinerjanya. Mengadopsi pendekatan sistematis terhadap manajemen risiko investasi sangat penting, yang mencakup identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko melalui struktur dan proses organisasi yang terintegrasi (Zholonko et al., 2021).

Risiko sistemik mengacu pada potensi gangguan yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Risiko ini sering kali muncul akibat keterkaitan antar lembaga keuangan dan dapat menyebabkan efek domino dalam perekonomian (Nabella et al., 2020). Dengan mengintegrasikan penilaian risiko sistematis ke dalam proses tinjauan mereka, inspektorat dapat lebih memahami saling ketergantungan antara lembaga keuangan dan ekonomi yang lebih luas, sehingga memungkinkan intervensi regulasi yang lebih tepat sasaran dan efektif (Zholonko et al., 2021). Susilo (2023) menekankan pentingnya audit risiko dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi keberlanjutan operasional organisasi. Lebih dikenal dengan risiko pasar, risiko sistematik ini berkaitan dengan perubahan secara keseluruhan. Risiko sistemik dalam reviu keuangan mengacu pada potensi gangguan yang dapat mempengaruhi sistem keuangan secara keseluruhan. Inspektorat yang menerapkan pendekatan berbasis risiko sistemik berfokus pada identifikasi dan mitigasi risiko yang dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan (Hariadi & Slamet, 2020). Pendekatan berbasis risiko mengakui bahwa tidak semua area aktivitas keuangan memiliki tingkat risiko yang sama, sehingga memungkinkan auditor untuk memusatkan perhatian dan sumber daya mereka pada area-area yang memiliki potensi salah saji atau ketidakpatuhan paling tinggi (Arzhenovskiy & Bakhteev, 2015).

2.3. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Global

Kepatuhan terhadap standar akuntansi global, seperti Standar Pelaporan Keuangan Internasional, sangat penting untuk memastikan transparansi dan komparabilitas dalam pelaporan keuangan (Gustafson et al., 2005). Standar akuntansi global dirancang untuk memberikan kerangka kerja umum untuk pelaporan keuangan, yang memungkinkan investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang dapat diandalkan dan konsisten (Gleißner & Berger, 2024). Inspektorat memainkan peran penting dalam memantau kepatuhan terhadap standar-standar ini, karena penyimpangan dapat mendistorsi informasi keuangan dan merusak integritas system keuangan. Hal ini sangat relevan mengingat standar akuntansi adalah dasar untuk melakukan pekerjaan akuntansi dan mengembangkan system akuntansi (Luo, 2022). Pembentukan system kepatuhan sangat penting untuk memastikan kualitas informasi akuntansi dengan memitigasi risiko distorsi dan kesalahan penyajian (Syrtseva & Cheban, 2021). Kepatuhan (compliance) dalam konteks akuntansi pemerintahan merujuk pada tingkat kesesuaian laporan keuangan sector public dengan standar akuntansi internasional, khususnya International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). IPSAS adalah seperangkat standar akuntansi internasional yang dikembangkan oleh IPSASB (International Public Sector Accounting Standards Board), sebuah dewan standar dibawah International Federation of Accountants (IFAC). Menurut IFAC (2021), kepatuhan terhadap IPSAS memungkinkan transparansi, akuntabilitas, dan komparabilitas laporan keuangan pemerintah lintas negara, sekaligus meningkatkan kepercayaan public dan investor.

IPSAS dirancang untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di sector public dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perbandingan internasional. Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi IPSAS,

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

tetapi telah mengembangkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71, yang merujuk pada prinsip-prinsip IPSAS. Beberapa penelitian dan literatur yang membahas implementasi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi global dalam konteks pemerintahan di Indonesia antara lain, dalam buku (Haryanto & Arifuddin, 2018), membahas mengenai kebijakan akuntansi dan system akuntansi pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 (2010) tentang standar akuntansi pemerintahan dan tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Dan dalam penelitian (Lestari & Rahayu, 2020), yang membahas mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dalam pengambilan keputusan internal dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.4. Integrasi Risiko Sistematik dan Kepatuhan dalam Reviu

Menggabungkan perspektif risiko sistematis dan kepatuhan terhadap standar akuntansi global menciptakan efek sinergis yang meningkatkan efektivitas tinjauan keuangan secara keseluruhan (Syrtseva & Cheban, 2021). Inspektorat berperan penting dalam mengintegrasikan penilaian risiko sistemik dan kepatuhan terhadap standar akuntansi global. Pendekatan terpadu ini memastikan bahwa inspektorat tidak hanya menilai kepatuhan organisasi terhadap aturan akuntansi, tetapi juga mempertimbangkan konteks ekonomi dan pasar yang lebih luas tempat organisasi beroperasi. Dengan menyelaraskan kedua dimensi ini, inspektorat dapat memberikan penilaian yang lebih akurat dan berwawasan ke depan atas kesehatan keuangan dan profil risiko Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Akuntansi adalah bahasa bisnis, dengan peraturan dan standarnya sendiri yang berbeda-beda di setiap wilayah dan ekonomi, sehingga menjadikan harmonisasi sebagai tujuan yang kompleks namun penting (Mohamed, 2023). Harmonisasi berusaha untuk meningkatkan kesesuaian praktik akuntansi dengan menetapkan batasan seberapa besar perbedaannya (Lakmal, 2014). Upaya untuk mencapai harmonisasi internasional telah menimbulkan perdebatan tentang apakah standar harus diselaraskan, dibuat seragam, atau sesuatu di antara keduanya (Mohamed, 2023). Melalui asimilasi dimensi-dimensi ini, inspektorat berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengembangkan pemahaman yang lebih holistik mengenai risiko yang dihadapi lembaga keuangan dan potensi dampaknya terhadap lanskap ekonomi yang lebih luas.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam penerapan pendekatan multidimensional dalam audit keuangan oleh inspektorat, dengan mengkaji bagaimana perspektif risiko sistemik dan kepatuhan terhadap standar akuntansi global diintegrasikan dalam proses audit. Penelitian dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Bangkalan sebagai unit yang menjalankan audit internal atas laporan keuangan instansi pemerintah. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive dan meliputi auditor senior, kepala subbagian pengawasan internal serta penyusun laporan audit. Menurut Turner (2020) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan ketika peneliti sudah mempunyai individu sasaran dengan karakteristik yang sesuai dengan penelitian. Berikut nama-nama informan yang diwawancarai bukan nama sebenarnya:

Tabel 1 Nama Informan

No	Nama	Jabatan
1	Ir. Agus Hartanto, SH	Ketua Irban IV
2	Ani Dwimulyani, S.Si	Auditor Ahli Muda
3	Sri Muslimah, SH	Auditor Ahli Muda
4	Budi Sulistio, SH	Auditor Ahli Pertama

Sumber: Data diolah 2025

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan melalui 3 tahap yaitu:

1. Dokumentasi: Mengkaji laporan audit dan dokumen pendukung seperti kertas kerja, daftar evaluasi, dan rekomendasi.
2. Wawancara semi-terstruktur: Untuk memperoleh perspektif auditor mengenai penerapan dimensi risiko dan standar akuntansi global.
3. Observasi non-partisipatif: Melihat proses audit pada tahap pelaksanaan dan pembahasan hasil audit

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan model yang meliputi:

1. Reduksi data: Menyeleksi dan menyederhanakan data yang relevan.
2. Penyajian data: Menyusun informasi dalam bentuk matrik atau narasi tematik

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: mencari pola hubungan antar dimensi audit

Metode penelitian ini dirancang untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan pendekatan multidimensional dalam reviu keuangan oleh inspektorat, serta dampaknya terhadap kualitas audit berbasis risiko dan kepatuhan terhadap standar akuntansi global seperti IPSAS dan SAP.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan dengan 3 auditor pada Inspektorat Kab. Bangkalan dan serta analisis dokumentasi terkait acuan dan prosedur reviu keuangan. Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa temuan utama:

1. Pendekatan Multidimensional dalam Reviu Keuangan
   - Inspektorat Kab. Bangkalan menerapkan pendekatan multidimensional dalam reviu keuangan.
   - Masih banyak auditor yang tidak paham mengenai pendekatan ini
2. Perspektif Risiko Sistematik
   - Inspektorat Kab. Bangkalan telah menggunakan analisis risiko untuk menilai potensi kecurangan dan ketidakpatuhan signifikan dalam laporan keuangan.
   - Tidak banyak auditor yang dapat menerapkan risiko ini
3. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Global
   - Secara keseluruhan dalam mereviu keuangan, Inspektorat Kab. Bangkalan sudah sepenuhnya menganut SAP dan acuan-acuan yang sudah ditentukan dalam prosedur reviu keuangan.
   - Untuk standar dalam internasional seperti IPSAS masih belum sepenuhnya dikarenakan ada beberapa perbedaan dalam IPSAS dan SAP.
4. Integrasi Risiko Sistemik dan Kepatuhan dalam Reviu
   - Perspektif yang sudah dilakukan 100% yaitu kepatuhan pada regulasi dan standar akuntansi yang sudah diterapkan dan diikuti dengan perspektif risiko sistematik hanya sekitar 70% dilakukan.
   - Standard Operating Procedure (SOP) yang tidak dijalankan dengan baik
5. Kendala yang dialami
   - Banyak pegawai pada Inspektorat Kab. Bangkalan bukan murni dari jurusan akuntansi
   - Pelatihan yang diberikan kepada hanya sekali dalam setahun
   - Tekanan waktu untuk penyelesaian reviu menjelang tanggal laporan keuangan

4.2 Pembahasan Penelitian

1. Pentingnya Pendekatan Multidimensional

Pendekatan multidimensional dalam reviu keuangan menjadi sangat krusial dalam konteks pengelolaan keuangan sektor public saat ini. Sebagaimana dinyatakan pada statement Baharom (2024), pengawasan yang hanya berfokus pada aspek kepatuhan administrative tidak cukup efektif dalam mengantisipasi dinamika resiko yang semakin kompleks. Dengan adanya pendekatan ini, inspektorat dapat melakukan evaluasi yang lebih komprehensif, tidak hanya terhadap aspek formalitas laporan keuangan, akan tetapi juga terhadap substansi ekonominya.

Auditor di Inspektorat Kab. Bangkalan menyatakan pemahaman mereka terhadap konsep pendekatan multidimensional masih bersifat konseptual. Hanya beberapa auditor yang dapat menjelaskan secara rinci dimensi-dimensi utama dalam pendekatan tersebut, seperti risiko sistemik, kepatuhan akuntansi, efektivitas pengendalian internal, dan keterandalan informasi keuangan. Mayoritas lainnya hanya memahami pendekatan ini sebagai penggabungan antara audit keuangan dan audit kepatuhan. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara konsep ideal pendekatan multidimensional dengan pemahaman operasional di lapangan. Penyebabnya antara lain karena kurangnya pelatihan teknis, referensi metode audit multidimensi yang terbatas. Pak Agus menyatakan "Kalau secara gambaran besar itu dari kita tidak tau ya mbak bagaimana kita mendeskripsikan pendekatan multidimensional itu sendiri bagaimana, akan tetapi jika kedua perspektif tersebut termasuk pada pendekatan multidimensional berarti inspektorat menggunakan pendekatan tersebut".

Dalam praktek kerjanya, penerapan pendekatan ini melibatkan kombinasi antara kepatuhan pada standar akuntansi dan risiko sistematik. Konsep ini memberikan pandangan yang lebih luas bagi auditor dalam memahami kondisi keuangan dan juga kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan tersebut. Sehingga hasil reviu akan menjadi informasi yang relevan untuk BPK dalam meminimalisir temuan audit oleh BPK dan meyakinkan bahwa laporan keuangan yang telah disusun sudah berdasarkan SAP. Pendekatan multidimensional ini akan memberikan manfaat untuk auditor dalam mereviu laporan keuangan. Auditor tidak hanya mengandalkan regulasi dan standar yang sudah diterapkan melainkan menggunakan dinamika risiko yang mencegah dampak negatif yang meluas.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Hal ini sesuai arahan IFAC (2021) yang mendorong sektor public untuk menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko dalam laporan keuangan. Dengan hal ini, pendekatan multidimensional akan menjadi alat strategis bagi inspektorat untuk meningkatkan kualitas pengawasan laporan keuangan. Selanjutnya penerapan pendekatan ini harus didukung penuh dengan pengembangan sumber daya manusia, teknologi informasi, serta pembaharuan metodologi reviu agar mampu menjawab tantangan risiko yang semakin dinamis

.

2. Perspektif Risiko SIstematik

Dari wawancara terhadap 4 auditor, hanya 2 auditor yang menyatakan telah memiliki sistem formal untuk mengidentifikasi risiko sistemik. Sistem tersebut umumnya berupa dokumen pemetaan risiko tahunan, namun belum terintegrasi ke dalam prosedur reviu secara menyeluruh. Sebagian besar auditor menyatakan bahwa prosedur reviu keuangan mereka mengacu pada checklist teknis dan regulasi Permendagri/Pemda, namun tidak mencantumkan aspek risiko makro atau risiko lintas sektor. Artinya, penilaian risiko yang dilakukan bersifat unit spesifik dan tidak mempertimbangkan potensi dampak sistemik seperti ketergantungan fiskal, perubahan kebijakan nasional, atau ketidaksesuaian sistem informasi.

Dari wawancara dengan 4 auditor internal, sebanyak 2 auditor menyatakan belum pernah mendapatkan pelatihan tentang risiko sistemik atau audit berbasis risiko lintas sektor. Mayoritas auditor hanya mengenal konsep *risiko inheren dan risiko kontrol* dalam konteks audit standar, bukan dalam konteks sistemik. Sebagian besar juga mengandalkan pendekatan dokumen dan kepatuhan administratif dalam melaksanakan reviu. Ketika ditanya apakah pernah melakukan analisis risiko berdasarkan tren ekonomi makro atau kebijakan nasional, hampir semua auditor menyatakan hal itu di luar lingkup tugas mereka saat ini. Ibu Ani menyatakan bahwasannya “biasanya paling sering risiko yang kita gunakan itu risiko salah saji mbak, terkadang pihak BPKAD salah menyajikan beberapa akun pada Laporan Keuangan, mungkin itu juga yang bisa kami sebut sebagai analisis risiko nya mbak”.

Risiko sistemik dalam konteks keuangan sektor publik merujuk pada potensi gangguan besar yang tidak hanya mempengaruhi satu unit organisasi, tetapi berdampak luas pada kinerja fiskal dan akuntabilitas pemerintahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai risiko sistemik di kalangan auditor internal masih bervariasi. Beberapa auditor sudah mulai menggunakan pendekatan berbasis risiko dalam reviu mereka, tetapi banyak yang masih mengandalkan prosedur standar yang sifatnya normatif. Dalam konteks ini, inspektorat perlu mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor eksternal tersebut secara proaktif. Misalnya, keterlambatan pencairan anggaran akibat perubahan kebijakan fiskal bisa mempengaruhi kebenaran penyajian laporan keuangan.

3. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Global

Meskipun seluruh pemda telah menyusun LKPD berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, hasil reviu menunjukkan bahwa implementasi substansial terhadap SAP berbasis IPSAS masih belum merata. Salah satu temuan penting adalah pengungkapan beban non-ka**s** (seperti beban akrual, kewajiban manfaat pasca kerja, atau kewajiban litigasi) belum menjadi fokus dalam reviu inspektorat. LKPD juga umumnya **t**idak menyajikan risiko penghapusan piutang dan nilai tercatat bersih, yang bertentangan dengan prinsip pengukuran IPSAS 1 dan IPSAS 19.

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang harmonis dengan *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS), menjadi salah satu dimensi penting dalam reviu keuangan. Penelitian ini menemukan bahwasannya pemerintah daerah telah berupaya mengimplementasikan SAP secara konsisten, akan tetapi beberapa area dalam laporan keuangan masih menunjukkan kelemahan, khususnya dalam pencatatan aset tetap dan kewajiban jangka panjang. Permasalahan ini sebagian disebabkan oleh kurangnya pemahaman teknis auditor terhadap basis akrual dan kas secara penuh.

Menurut IFAC (2021), implementasi IPSAS di negara berkembang memang menghadapi tantangan besar, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, kualitas data keuangan yang rendah, hingga rendahnya otomatisasi sistem akuntansi. Fenomena ini sering terjadi sehingga nilai yang tercatat dalam laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Dalam reviu keuangan ini, auditor inspektorat harus mampu menilai sejauh mana laporan keuangan mematuhi prinsip-prinsip dasar yang sudah ditetapkan dalam SAP, termasuk dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan informasi keuangan. Namun dari hasil wawancara yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa sampai saat ini sebagian besar reviu masih fokus pada aspek formil seperti hanya dengan ketersediaan dokumen pendukung. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi dalam aspek substantif standar akuntansi global.

Laporan Keuangan yang menjadi objek reviu telah menyusun laporan keuangan berbasis akrual dan cash sesuai SAP, yang mengacu pada IPSAS. Namun, dari hasil reviu, ditemukan beberapa titik lemah seperti salah saji dalam akun yang digunakan, perbedaaan nomina yang ditargetkan dan yang lainnya. Bu Sri menyatakan bahwa “bagian paling sulit dari reviu itu mbak ya menilai kewajaran angka dalam laporan berbasis akrual karena kan kalo

akrual itu belum jelas ya mbak keluar atau masuknya uang itu sendiri, dan juga yang tidak dapat meminimalisir temuan BPK nantinya". Oleh karena itu, peningkatan kapasitas auditor internal dalam memahami dan mengimplementasikan SAP/IPSAS menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas reviu keuangan. Pelatihan intensif, penguatan peran pusat pendidikan dan pelatihan auditor, serta penggunaan teknologi berbasis audit tools akrual akan sangat membantu mengatasi tantangan ini di masa depan.

4. Integrasi Risiko Sistematik dan Kepatuhan dalam Reviu

Dimensi yang paling sering digunakan dalam pelaksanaan reviu keuangan adalah kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan. Informan (100%) menyatakan bahwa fokus utama reviu adalah memeriksa kesesuaian laporan keuangan dengan ketentuan seperti PP No 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Keuangan Pemerintah; PP No 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; PP No 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PMK No: 217/PMK.05/2015, tentang PSAP Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum dan masih banyak yang lainnya.

Sementara itu, dimensi risiko sistemik baru diterapkan oleh sebagian kecil auditor. Bahkan dari mereka, hanya dua yang memiliki peta risiko (risk map) tahunan untuk mendukung penilaian risiko dalam reviu. Dimensi lainnya seperti efektivitas pengendalian internal dan kualitas sistem informasi keuangan daerah jarang dijadikan objek eksplisit dalam pelaksanaan reviu. Kurangnya kerangka risiko sistemik menyebabkan beberapa resiko besar luput dari perhatian, seperti keterlambatan pencairan DAK, perubahan kebijakan transfer pusat. Hal ini berdampak pada kegagalan reviu dalam memberikan peringatan dini *(early warning)* terhadap potensi penyimpangan besar. Temuan dari studi kasus ini menunjukkan bahwa pemeriksaan kepatuhan terhadap SAP tidak terintegrasi dengan hasil analisis risiko sistemik keuangan seperti ketidaksesuaian klasifikasi belanja tidak dihubungkan dengan potensi risiko terhadap akuntabilitas fiskal. Reviu tetap berorientasi pada kepatuhan prosedural, tanpa melihat hubungan antar akun atau pola historis ketidaksesuaian.

5. Kendala yang dialami

Semua informan menyatakan bahwasannya kebanyakan kendala yang dialami saat proses reviu laporan keuangan dikarenakan keterbatasan kompetensi dari auditor yang ada di Inspektorat Kab. Bangkalan. Hanya sekitar kurang lebih 4-3 orang saja yang latar belakang pendidikannya jurusan dari Akuntansi, lainnya dari latar belakang pendidikan yang berbeda, seperti dari hukum saintek dan lain-lain. oleh karena itu butuh pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai pengakuan-pengakuan dalam laporan keuangan tersebut.

Minimnya pelatihan yang diadakan mengenai reviu yang dilakukan tiap tahun oleh Inspektorat menjadikan salah satu kendala yang dialami dalam proses mereviu laporan keuangan. Harusnya Inspektorat mengadakan pelatihan sesering mungkin agar auditor-auditor yang ada di Inspektorat lebih mendalami lagi mengenai reviu yang dilakukan tiap tahunnya. Pak Budi menyatakan "Karena kita ini dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda mbak, seharusnya pelatihan yang diterima lebih sering lagi, apalagi acuan kita ini kan peraturan, undang-undang dan lainnya yang bisa berubah sewaktu-waktu jadi harus lebih mendalami lagi untuk mengartikan isi dari prosedur reviu itu sendiri".

Tuntutan waktu untuk menyelesaikan reviu laporan keuangan ini juga merupakan tantangan yang cukup krusial. Tekanan ini sendiri muncul karena keterbatasan waktu antara penyerahan laporan keuangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan batas waktu penyampaian laporan konsolidasian pemerintah daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), biasanya pada akhir Maret untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daera (LKPD) anaudited. Ibu Ani menyatakan "Biasanya ini mbak waktu penyerahan laporan keuangan ke kita ini biasanya lumayan mepet waktunya, makanya kita juga terkadang harus terburu-buru juga melaksanakan reviunya, agar kita bisa menyerahkan hasil reviu kita ke BPK juga tepat waktu".

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendekatan multidimensional yang diterapkan oleh Inspektorat dalam melakukan riviu keuangan memberikan peningkatan signifikan dalam kualitas pengawasan internal. Dengan menggabungkan perspektif risiko sistematik dan kepatuhan terhadap standar akuntansi global, Inspektorat tidak hanya dapat mendeteksi potensi penyimpangan keuangan secara lebih dini, tetapi juga mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Strategi ini mencerminkan sinergi antara fungsi pengawasan dan pemenuhan standar internasional yang memperkuat tata kelola keuangan yang berintegritas. Penerapan metodologi ini menjadi langkah adaptif yang relevan dalam menghadapi kompleksitas lingkungan keuangan modern serta tuntutan reformasi birokrasi dan akuntabilitas publik yang semakin tinggi.

Keterbaatasan penelitian ini adalah tidak mewawancarai pihak-pihak penting yang berkaitan seperti BPK yang menerima hasil riviu dari Inspektorat yang akan dijadikan audit, dan juga pihak pembuat laporan keuangan pemerintah daerah untuk memvalidasi kualitas reviu yang telah dilakukan oleh Inspektorat. Dan saran untuk penelitian selanjutnya, agar memperoleh hasil yang lebih akurat peneliti dapat memperluas objek dari penelitian

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

ini. Dengan menutupi keterbatasan artikel ini, dan juga bisa dengan menguji pendekatan multidimensional lainnya untuk diterapkan dalam riviu keuangan.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam memenuhi salah satu tugas akhir dari pelaksanaan magang pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura. lSaya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang sudah terlibat dalam penalitian ini, kepada bapak dan ibu informan yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang saya butuhkan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, G. F., & Abdullah, M. (2022). Adoption of International Financial Reporting Standard: A Literature Review. *American Journal of Economics and Business Innovation*, *1*(3), 36–43. https://doi.org/10.54536/ajebi.v1i3.586

Aikman, D., Haldane, A. G., Hinterschweiger, M., & Kapadia, S. (2018). *Staff Working Paper No. 712 Rethinking financial stability*. www.bankofengland.co.uk/working-paper/Working-papers

Akande Popoola, A., & Temitope, O. (2017). Global Accounting Regulation: Impact Of IFAC On Financial Reporting Quality. *International Journal of Engineering Technologies and Management Research*, *4*(8), 1–7. https://doi.org/10.5281/zenodo.888085

Arnaboldi, F., & Vasciaveo, C. (2017). Role of Internal Audit on Risk Culture. In A. Carretta, F. Fiordelisi, & P. Schwizer (Eds.), *Risk Culture in Banking* (pp. 403–430). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57592-6_18

Arzhenovskiy, S., & Bakhteev, A. (2015). Model of integrated estimation of audit risk. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, *6*(36), 241–246. https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n3s6p241

Baharom, Z. (2024). The Integration Of Internal Audit And Risk Management: A Systematic Literature Review And Bibliometric Analysis (1995-2023). *International Journal of Science Academic Research*, *05*, 8526–8534. http://www.scienceijsar.com

Black, J., & Baldwin, R. (2010). *Really Responsive Risk-Based Regulation*.

Demartini, C., & Trucco, S. (2017). Audit Quality. In C. Demartini & S. Trucco (Eds.), *Integrated Reporting and Audit Quality: An Empirical Analysis in the European Setting* (pp. 37–58). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-48826-4_3

Gleißner, W., & Berger, T. B. (2024). Enterprise Risk Management: Improving Embedded Risk Management and Risk Governance. In *Risks* (Vol. 12, Issue 12). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). https://doi.org/10.3390/risks12120196

Gustafson, C. R., Pederson, G. D., & Gloy, B. A. (2005). Credit risk assessment. *Agricultural Finance Review*, *65*(2), 201–217. https://doi.org/10.1108/00214660580001173

Hariadi, B. W., & Slamet. (2020). Analisis Perencanaan Audit Intern Berbasis Risiko pada Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik. *Accounting and Business Information System Journal*, *8*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.22146/abis.v8i1.58883

Haryanto, & Arifuddin. (2018). *Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah*. UNDIP Press.

IFAC. (2021). *Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements International Public Sector Accounting Standards Board ®*.

Lakmal, K. A. D. (2014). *Impact of International Accounting Harmonization*.

Leocádio, D., Malheiro, L., & Reis, J. (2024). Artificial Intelligence in Auditing: A Conceptual Framework for Auditing Practices. In *Administrative Sciences* (Vol. 14, Issue 10). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). https://doi.org/10.3390/admsci14100238

Lestari, D., & Rahayu, S. (2020). The Effect Of The Implementation Of Accrual Based Government Accounting Standards (SAP) On The Internal-Decision Making And The Quality Of Financial Reporting On Local Government. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, *3*(2).

Luo, Y. (2022). Study of the Impact of Expected Credit Loss Model on the Quality of Accounting Information. In *BCP Business & Management FEMS* (Vol. 2022).

McGrath, J., & Walker, C. (2022). The Systemic Problem of Unethical Behaviours in Financial Services. In J. McGrath & C. Walker (Eds.), *New Accountability in Financial Services: Changing Individual Behaviour and Culture* (pp. 53–78). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-88715-5_3

Mohamed, S. H. (2023). *Need For Harmonization Of International Accounting Standards*. https://ssrn.com/abstract=4356970

Nabella, R. S., Wahyudi, S. T., & Tawakalni, D. I. (2020). Deteksi Risiko Sistematik dan Keterkaitan Keuangan: Studi pada Institusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *21*(2).

Peraturan Menteri Keuangan No. 255/PMK.09/2015. (2015). *Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga*. www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71. (2010). *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Sun, M., & Qu, Y. (2020). *IT Audit Education Implemented Under the Cloud Accounting*.

Sun, Y., Li, J., Lu, M., & Guo, Z. (2024). Study of the Impact of the Big Data Era on Accounting and Auditing. *Frontiers in Business, Economics and Management*, *13*(3), 44–47.

Susilo, J. (2023). A Critical Analysis of Risk Auditing: An Auditor's Approach. *Golden Ratio of Auditing Research*, *3*(2), 94–106. https://doi.org/10.52970/grar.v3i2.381

Suwanda, D., Wiratmoko, & Lindri, I. (2017). *Panduan Penerapan Riviu Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah*. PT Remaja Rosdakarya.

Syrtseva, S., & Cheban, Y. (2021). Accounting Compliance: An Institutional Approach To Ensure The Quality Of Accounting Information Of The Enterprise. *Baltic Journal of Economic Studies*, *7*(2), 210–218. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-2-210-218

Turner, D. P. (2020). Sampling Methods in Research Design. In *Headache* (Vol. 60, Issue 1, pp. 8–12). Blackwell Publishing Inc. https://doi.org/10.1111/head.13707

Weber, R. H. (2010). Multilayered Governance in International Financial Regulation and Supervision. *Journal of International Economic Law*, *13*(3), 683–704. https://doi.org/10.1093/jiel/jgq033

Zholonko, T., Grebinchuk, O., Bielikova, M., Kulynych, Y., & Oviechkina, O. (2021). Methodological Tools for Investment Risk Assessment for the Companies of Real Economy Sector. *Journal of Risk and Financial Management*, *14*(2). https://doi.org/10.3390/jrfm14020078